

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bagian isu kebijakan yang strategis di Indonesia saat ini karena perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdampak pada upaya terciptanya *good governance*. Perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga berdampak luas pada bidang ekonomi dan politik (Agus Dwiyanto 2021). Dalam bidang ekonomi, perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mendorong perbaikan iklim investasi, sedangkan dalam bidang politik perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mampu memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik. Organisasi sektor publik saat ini tengah menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan. Berbagai tuntutan tersebut menyebabkan akuntansi dapat dengan cepat diterima dan diakui sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola urusan-urusan publik (Mardiasmo 2021:1)

Pada dasarnya, pembentukan pemerintah Indonesia berhubungan erat dengan misi yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Misi tersebut merupakan dasar dari kewenangan pemerintah di dalam menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahannya baik tingkat pusat

maupun di tingkat daerah. Instansi-instansi sebagai pelaksana yang dibentuk pemerintah untuk menangani urusan-urusan pemerintahannya, merupakan salah satu penentu berjalannya misi dengan baik untuk mencapai cita-cita negara (Santoso dan Pambelum 2008).

Hasil kerja instansi pemerintah yang telah dicapai, dalam rangka implementasi urusan pemerintahan sesuai bidang pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya, dapat diketahui melalui informasi tentang akuntabilitas kinerja masing-masing instansi pemerintah tersebut. Informasi tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibutuhkan oleh pemerintah karena berdasarkan informasi tersebut, pemerintah mempunyai bahan pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang lebih baik lagi. Informasi tersebut juga diperlukan sebagai dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban

Akuntabilitas publik merupakan Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan Abdul Halim (2012:20)

Adapun Fenomena yang terjadi dalam perkembangan akuntabilitas sektor publik di Indonesia khususnya di kota Bandung Menurut Wali Kota Bandung Oded M Danial mengaku akan mengevaluasi jajarannya terkait raihan hasil penilaian penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung yang mendapat nilai BB. Penilaian yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk Kota Bandung ini menurun bila dibanding tahun 2019 lalu yang mampu mencapai nilai A. Penurunan tersebut dikarenakan masih ada Organisasi Perangkat Daerah yang abai dalam mengawal program kerjanya. Walikota masih menunggu laporan dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) dinas mana saja yang masih abai dalam merealisasikan program kerjanya. Jika sudah ada hasilnya, ia akan membina Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang abai dalam mengawal program kerjanya (Wali Kota Bandung Oded M Danial 2020)

Perkembangan akuntabilitas sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguat nya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik

Kewajiban sektor publik dalam mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan Akuntansi sektor publik ini terkait dengan akuntabilitas (*Acoountability*).Hasanah dan Fauzi (2017:2)

Adapun pengertian Menurut Indra Bastian (2014:6) Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada lembaga tinggi negara beserta departemen di bawahnya untuk penerapan pengelolaan berbagai dana masyarakat.

Akan tetapi terdapat fenomena mengenai akuntansi sektor publik khususnya pada dinas pendidikan Terdapat berbagai persoalan yang kerap terjadi yaitu berkaitan dengan pengelolaan anggaran. Dari observasi pengadaan barang/ jasa (PBJ) sektor pendidikan, ICW menemukan terdapat pengadaan yang tak sesuai kebutuhan dan tak dapat dimanfaatkan, baik karena mangkrak maupun tidak lengkap. Peneliti ICW mengatakan terdapat 52 kasus atau 21,7% dari total kasus yang berkaitan dengan penggunaan dana BOS. selain itu ada kasus lain seperti pembangunan infrastruktur dan pengadaan barang/ jasa non infrastruktur, seperti pengadaan buku, arsip sekolah, meubelair, perangkat TIK untuk e-learning, pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas pendidikan, dan lainnya. Dalam kasus pengadaan yang tidak sesuai ini melibatkan setidaknya 621 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Dinas Pendidikan dan instansi lain (di luar ASN di sekolah), yaitu sebanyak 288 atau 46,3%. Secara lebih rinci, ASN yang dimaksud merupakan ASN Staf di Dinas Pendidikan (160 tersangka); ASN instansi lain seperti kementerian, Dinas Sosial, Dinas Syariat Islam, Dinas Komunikasi dan Informasi, dll (84 tersangka); dan Kepala Dinas Pendidikan (44 tersangka). (Anggraeni 2021)

Penelitian terdahulu menjelaskan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh terhadap Akuntabilitas publik. Penelitian yang dilakukan oleh Winda Riva Rahmawati & Herliana (2022) menjelaskan bahwa variabel penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh terhadap Akuntabilitas. Begitupun dengan penelitian Sherillia Septriane & Yon Nusdal (2012) menyebutkan bahwa Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh terhadap Akuntabilitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik memiliki hubungan yang cukup kuat terhadap akuntabilitas.

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan Mentari Cefrida S, Emrinaldi Nur, & Mudrika Alamsyah Hasan (2014) menjelaskan Penerapan akuntansi sektor publik memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan. Maka dapat dikatakan penerapan akuntansi sektor publik tidak memiliki pengaruh yang signifikan dengan akuntabilitas kinerja dan pengaruh tersebut negatif tidak signifikan.

Selain Akuntansi Sektor Publik, Menurut Mursyidi (2013:59) Untuk mengetahui posisi akuntabilitas dan kinerja keuangan suatu entitas atau instansi dapat dilihat dalam laporan keuangannya untuk satu periode atau pada saat tertentu. Untuk menciptakan akuntabilitas maka laporan keuangan yang disampaikan juga harus berkualitas.

Menurut Baldric (2015:12) pengertian Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah: "Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut".

Adapun Fenomena yang terjadi dalam Kualitas Laporan keuangan Menurut Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna dalam sambutannya pada Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan, beliau mengatakan perangkat daerah yang memperoleh opini WTP tidak berarti LKPD bebas dari kesalahan. Ketua BPK mengungkapkan, BPK masih menemukan kelemahan antara lain kelemahan perincian akun yang disajikan tidak sesuai dengan SAP dan/atau tidak didukung dengan bukti yang cukup per pmda, sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, entitas terlambat menyampaikan laporan, sistem informasi

akuntansi dan pelaporan yang tidak memadai, serta sistem informasi akuntansi, tidak terdapat aktivitas yang efektif dalam pengelolaan dana, sehingga terjadi penggunaan dan pertanggungjawaban dana yang tidak sesuai ketentuan. Selain itu BPK menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan. Temuan tersebut salah satunya masih banyak pemerintah daerah yang belum tertib dalam menatausahakan Aset Tetap (Agung Firman Sampurna 2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Nining Asniar Ridzal (2020) menjelaskan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dan penelitian Kusnadi Yudha Wiguna , Anggia Syafitri , Ria Meika Putri (2021) menjelaskan *the quality of financial report gave the significant effect on accountability*. Sedangkan menurut penelitian Yolanda (2018) Penyajian Laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada objek dan periode penelitian. Pada penelitian sebelumnya menggunakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Pengadilan Agama dan Organisasi Perangkat daerah sebagai objeknya dengan periode penelitian dari tahun 2018-2021

Berdasarkan latar belakang serta masih adanya inkonsistensi dari penelitian terdahulu, serta perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah, sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung menurun dibanding tahun sebelumnya
2. Masih terdapat pengadaan yang tak sesuai kebutuhan dan tak dapat dimanfaatkan, baik karena mangkrak maupun tidak lengkap
3. Masih adanya Permasalahan penyajian laporan keuangan terjadi pada pemerintah daerah antara lain pada akun aset lancar, aset tetap, dan belanja modal

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh kinerja akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas publik?
2. Seberapa besar pengaruh kualitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas publik?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berkaitan erat dengan rumusan masalah yang dituliskan.

Tujuan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kinerja akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas publik.

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas publik.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu dan dapat digunakan sebagai gambaran dan informasi dalam pengembangan penelitian yang lebih baik lagi dan bahan perbandingan bagi peneliti yang akan mengambil topic yang serupa.

1.5.1 Kegunaan Praktis

- 1) Bagi penulis

Penelitian disajikan untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman serta memberikan gambaran tentang seberapa besar kinerja akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan daerah mempengaruhi akuntabilitas publik.

- 2) Penelitian Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian dapat berguna dan dapat menjadi gambaran informasi dalam mengembangkan penelitian yang lebih baik dan bahan perbandingan bagi peneliti yang akan mengambil topic yang sama.

- 3) Bagi Pengembangan Ilmu

Penelitian yang diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi terutama pada kinerja akuntansi sektor publik dan juga untuk referensi bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah sejenis, serta dapat digunakan dalam penelitian pada masa yang akan datang.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Adapun kegunaan akademis dalam penelitian ini adalah sebagai media referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama, yaitu tentang seberapa besar kinerja akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan daerah mempengaruhi akuntabilitas publik.